

## **ABSTRAK**

### **Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul)**

**Yuliana  
5160111297**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Banguntapan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus. Metode penelitian dilakukan dengan teknik deskriptif komparatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa di Desa Banguntapan secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun masih ada beberapa ketentuan yang belum dilakukan. Pertama pada proses perencanaan APB Desa masih ada keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian dalam proses pelaksanaan juga masih ada ketentuan yang belum sesuai. Selanjutnya belum semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas Desa. Ketidaksihesuaian berikutnya di mana SPP seharusnya tidak dilakukan sebelum barang dan jasa diterima dan SPP belum dilengkapi dengan pernyataan tanggungjawab belanja. Proses pelaporan juga belum sesuai karena adanya keterlambatan, sedangkan untuk proses penatausahaan dan pertanggungjawaban di Desa Banguntapan secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata kunci: pengelolaan, keuangan, desa.

## **ABSTRACT**

***The Analysis of Village Financial Management Application Based on Regulation of Home Affairs Minister Number 20 Year 2018  
(Acase Study at Banguntapan, Bantul – Special Region of Yogyakarta)***

**Yuliana  
5160111297**

*The purpose of this study was to determine whether village financial management in Banguntapan Village was in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. This research was conducted in Banguntapan Village, Banguntapan District, Bantul Regency. This type of research is a case study. The research method was carried out by using a comparative descriptive technique. The results show that village financial management in Banguntaapan Village is generally in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. However, there are still some provisions that have not been implemented. First, in the APB Desa planning process there are still delays in obtaining a collective agreement. Then in the implementation process there are still inappropriate provisions. Furthermore, not all revenues and expenditures have been made through the Village cash account. The next non-conformity where SPP may be made before the goods and services are received and where the SPP application is still not equipped with a statement of responsibility for spending. The reporting process is also not appropriate due to delays, while the administrative and accountability process in Banguntapan Village as a whole is in accordance with Permendagri Number 20 of 2018.*

*Keywords: management, finance, village.*